



PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

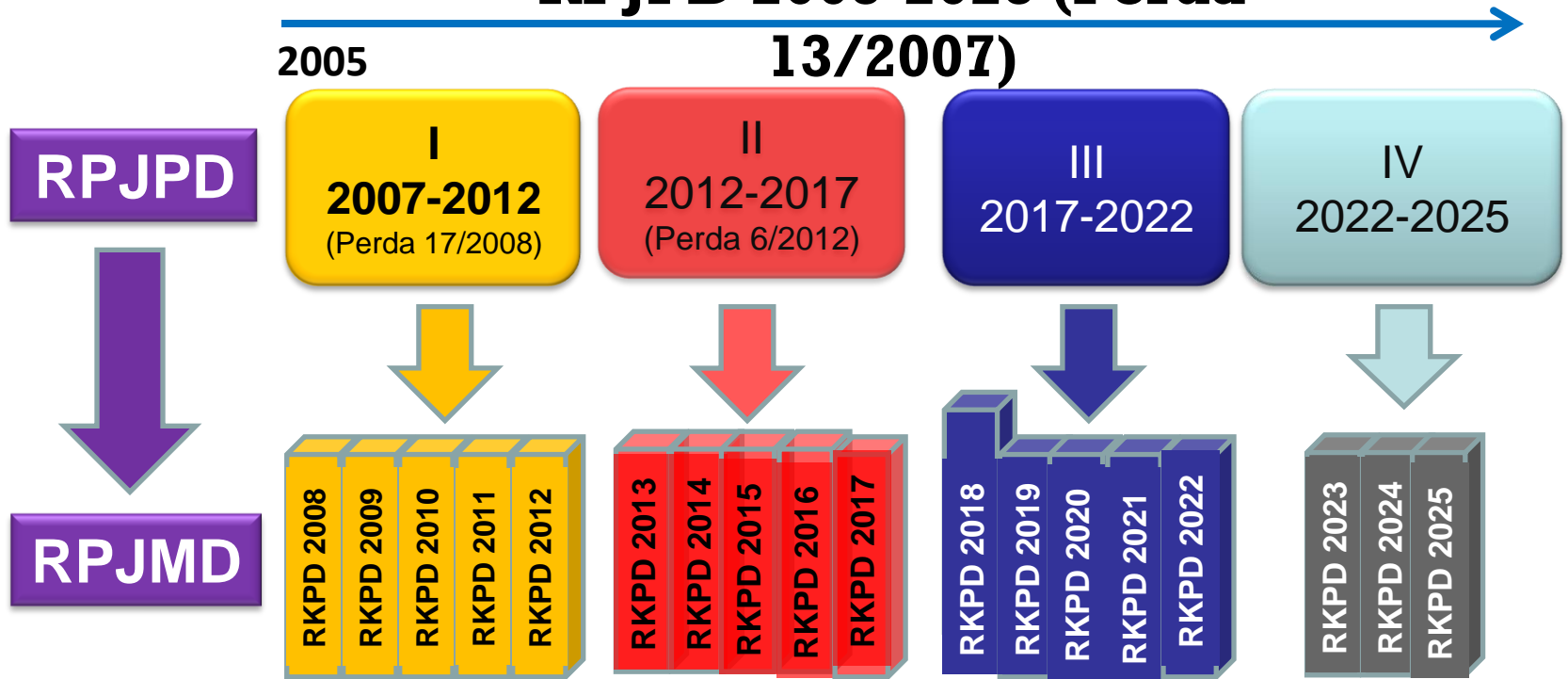
**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
PANGKALPINANG, 19 JANUARI 2017**

BAPPEDA

Planning for a better Babel

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

RPJPD 2005-2025 (Perda 13/2007)





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

KONDISI:

MASA RPJMD 2012-2017 BERAKHIR PADA TAHUN 2017

PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018 BERPEDOMAN PADA:

- 1. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK RPJPD 2005-2025**
- 2. RKP TAHUN 2018 DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT MENGACU PADA RPJMN 2015-2019**



RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2018

Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun Ketiga 2017-2022 “EKONOMI DAN PENGEMBANGAN KUALITAS SDM”

SASARAN POKOK	
Uraian	Indikator
1. Meningkatnya ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Proses Pembuatan Kebijakan.	Persentase Tingkat Partisipasi Publik dalam Proses Pembuatan Kebijakan
4. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
5. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi
6. Meningkatnya Rasio Belanja Publik terhadap Belanja Aparatur	Rasio Belanja Publik terhadap Belanja Aparatur
7. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson
	Indeks Gini
8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



ARAH KEBIJAKAN SASARAN 1:

MENINGKATNYA EKONOMI DAERAH

1	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;	6	Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.	12	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah produk pertanian;
2	Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan.	7	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	13	Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian
3	Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan	8	Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global.	14	Peningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis kehutanan
4	Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;	9	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	15	Pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
5	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta kemudahan perizinan dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.	10	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	16	Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
		11	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;	17	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
				18	Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah
				19	Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam





ARAH KEBIJAKAN SASARAN 2:

TERPENUHINYA KAPASITAS DAN KUALITAS SDM

1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan
4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan



ARAH KEBIJAKAN SASARAN 3,4 DAN 5:

Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu dilakukan melalui peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Sasaran 4: Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi

Pemeliharaan iklim demokrasi yang kondusif melalui pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri serta penguatan ketahanan masyarakat

Sasaran 5: Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.

Pembangunan pemerintahan umum diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah melalui penataan dan pemberdayaan birokrasi yang bersih, responsif dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government didukung dengan pendataan dan perencanaan komprehensif penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas, kualitas dan produktifitas sumber daya aparatur; pembangunan fasilitas-fasilitas publik dan penempatan aparatur hingga ke daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil dan susah dijangkau dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang pada semua lapisan birokrasi.



ARAH KEBIJAKAN SASARAN 6:

MENINGKATNYA RASIO BELANJA PUBLIK TERHADAP BELANJA APARATUR

Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, demokratis, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; mendorong terciptanya kemandirian fiskal melalui pengetatan terhadap pinjaman daerah dan mendorong pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah untuk sebesar mungkin kemakmuran masyarakat yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi; dan mendukung peningkatan daya saing.





ARAH KEBIJAKAN SASARAN 7:

MENURUNNYA DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DAN MASYARAKAT 0

1	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
2	pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang tertinggal, Strategis dan cepat tumbuh sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan wilayah lain.
3	peningkatan akses informasi, pemasaran, permodalan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan social capital dan human capital yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan pedesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja dan intervensi.
4	pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang tertinggal, Strategis dan cepat tumbuh sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan wilayah lain.

5	peningkatan akses informasi, pemasaran, permodalan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan social capital dan human capital yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan pedesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja dan intervensi.
6	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi
7	Penerapan konsep pembangunan berkeadilan melalui peningkatan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur strategis
8	Pemenuhan infrastruktur dasar secara merata





ARAH KEBIJAKAN SASARAN 7:

MENURUNNYA DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DAN MASYARAKAT (Lanjutan.....)

1	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
2	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
3	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
4	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
5	Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan prestasi olah raga
6	Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul.
7	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG);
8	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana





ARAH KEBIJAKAN SASARAN 8:

MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN TERKELOLANYA SDA

1. Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun akan datang.

2. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan



RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018

I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan Kualitas Guru

II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan KEK (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

V. KETAHANAN ENERGI

13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. KETAHANAN PANGAN

15. Peningkatan Produksi Pangan
16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemebuhan Kebutuhan Dasar
19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

IX. PEMBANGUNAN WILAYAH

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (al. Kebakaran hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua

X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

27. Penguatan Pertahanan
28. Stabilitas Politik dan Keamanan
29. Kepastian Hukum
30. Reformasi Birokrasi

KEK & KI SEI MANGKEI

Kab. Simalungun, Sumut

Beberapa Rencana Proyek K/L

- Pembangunan rumah susun
- Pembangunan Jalan Poros dan Jalan Lingkungan 3,5 km dan 6,5 km
- Cakupan Geoid teliti sebagai referensi tinggi bagi peta dasar skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK dan KI

KPBPB Sabang

Pariwisata Danau Toba
Kab. Samosir, Sumut

Beberapa Rencana Proyek K/L

- Pembangunan Jalan Tol Tinggi Pematang Siantar
- Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok - Onan Rungu KSPN Danau Toba
- Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu KSPN Danau Toba
- Bandar Udara Sibisa (Parapat) KSPN Danau Toba

Jalan Bebas Hambatan Medan - Kuala Namu

KPBPB Batam, Bintan, Karimun

KEK TANJUNG API-API

Kab. Banyuwasin, Sumatera Selatan

KI Tanggamus

Kab. Tanggamus, Lampung

Wilayah Sumatera 2018

Target Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,22
Target Sasaran Tingkat Kemiskinan	8,06
Target Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	4,27

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran terbuka :

1. Provinsi Kep.Riau
2. Provinsi Aceh
3. Provinsi Sumatera Utara.
4. Provinsi Kep. Bangka Belitung

Sektor-sektor penggerak perekonomian

1. Industri Pengolahan
2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
3. Pertambangan dan Penggalian
4. Perdagangan besar dan eceran
5. Konstruksi

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :

1. Provinsi Bengkulu
2. Provinsi Aceh
3. Provinsi Lampung
4. Provinsi Sumatera Selatan
5. Provinsi Sumatera Utara

KEK TANJUNG KELAYANG

Kab. Belitung, P. Bangka Belitung

Beberapa Rencana Proyek K/L

- Pengembangan Bandara Udara Hanandjoeddin
- Pembangunan Waduk Gunung Tajam (400 liter/detik)
- Pelebaran Jalan Nasional Tanjung Pandan - Tanjung Tinggi
- Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

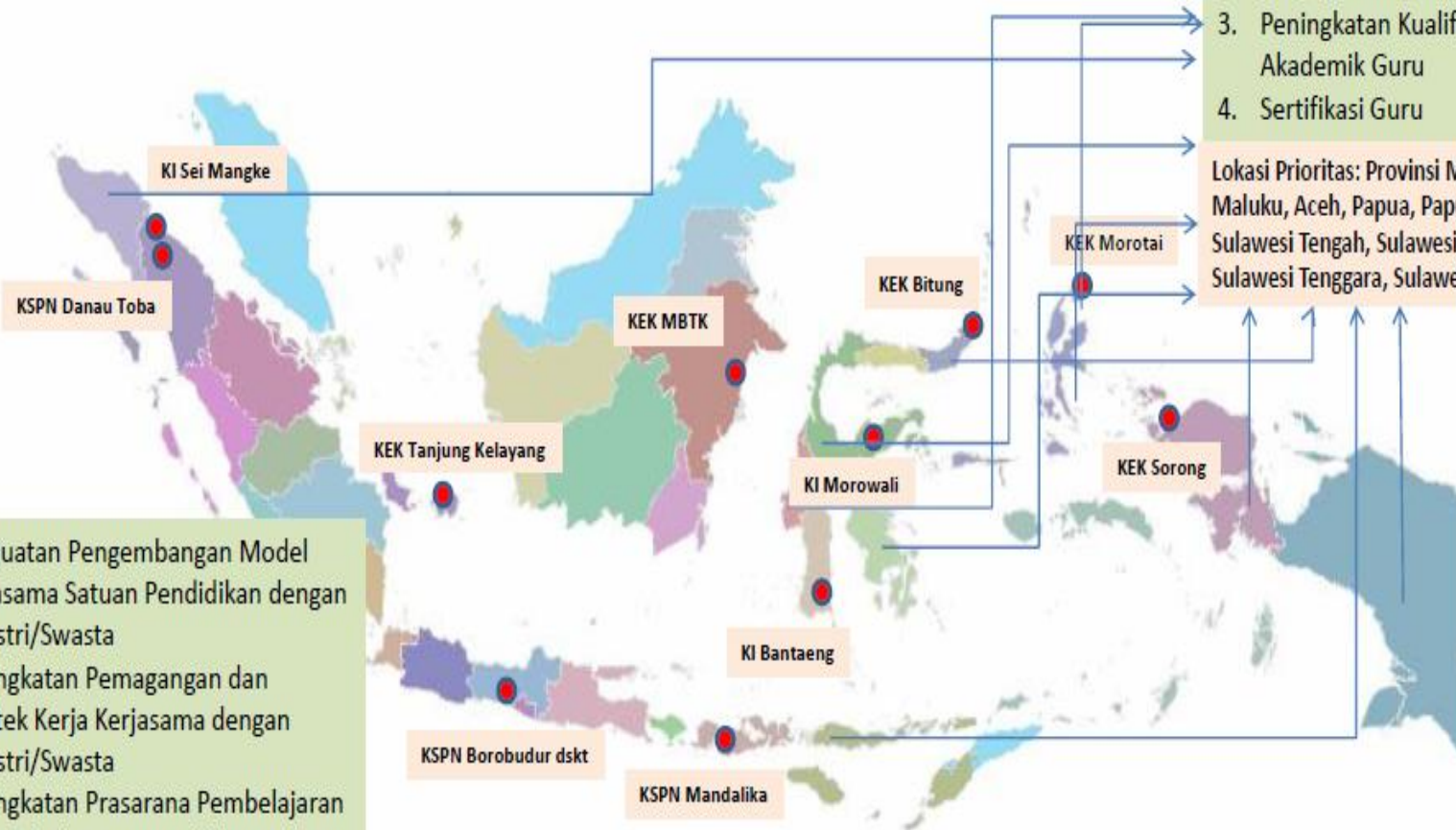
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL: PENDIDIKAN

1. Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/Swasta
2. Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta
3. Peningkatan Prasarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi
4. Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi

Lokasi Prioritas: KI, KEK, KSPN

1. Peningkatan Kapasitas LPTK
2. Peningkatan Kompetensi Guru
3. Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru
4. Sertifikasi Guru

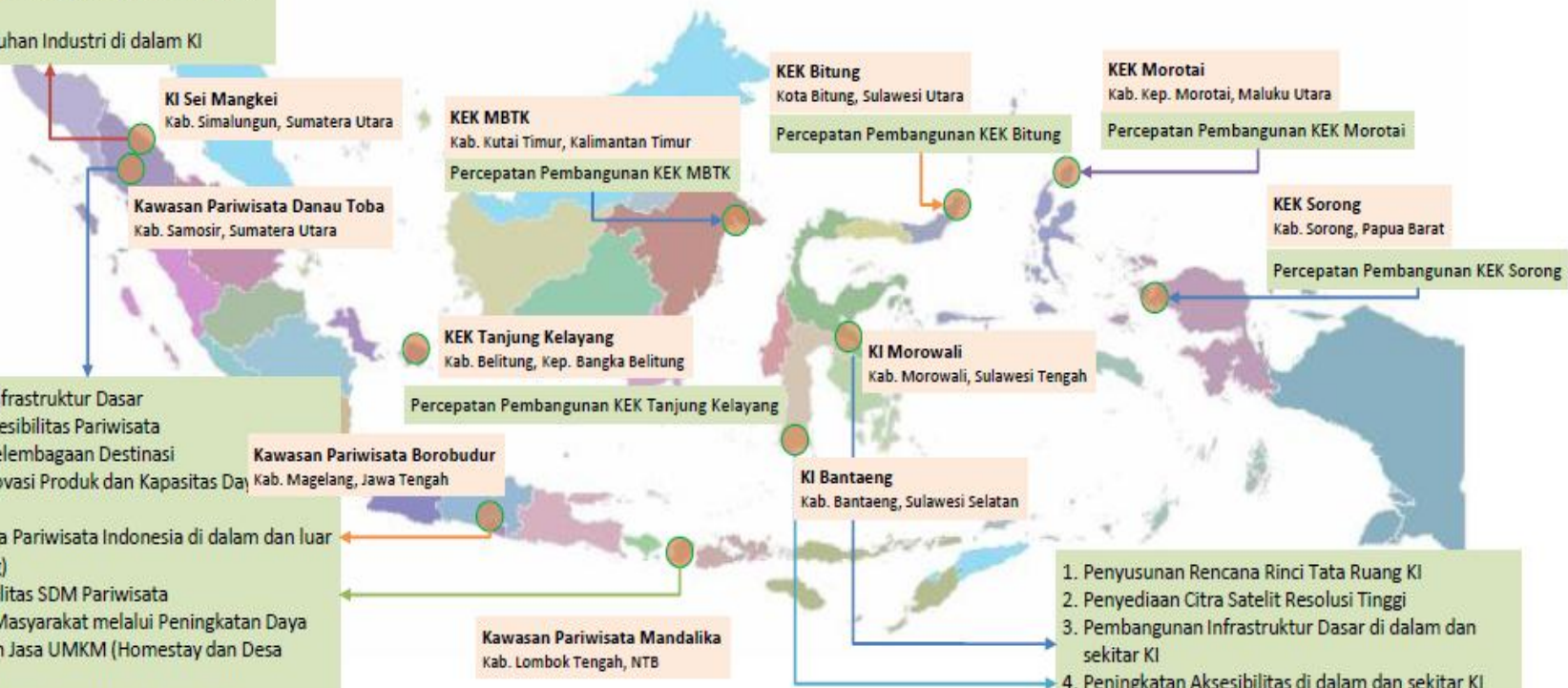
Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Utara, Maluku, Aceh, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara



HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL

4. DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

1. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI
2. Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi
3. Pembebasan Lahan
4. Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI
5. Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI
6. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK
7. Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI



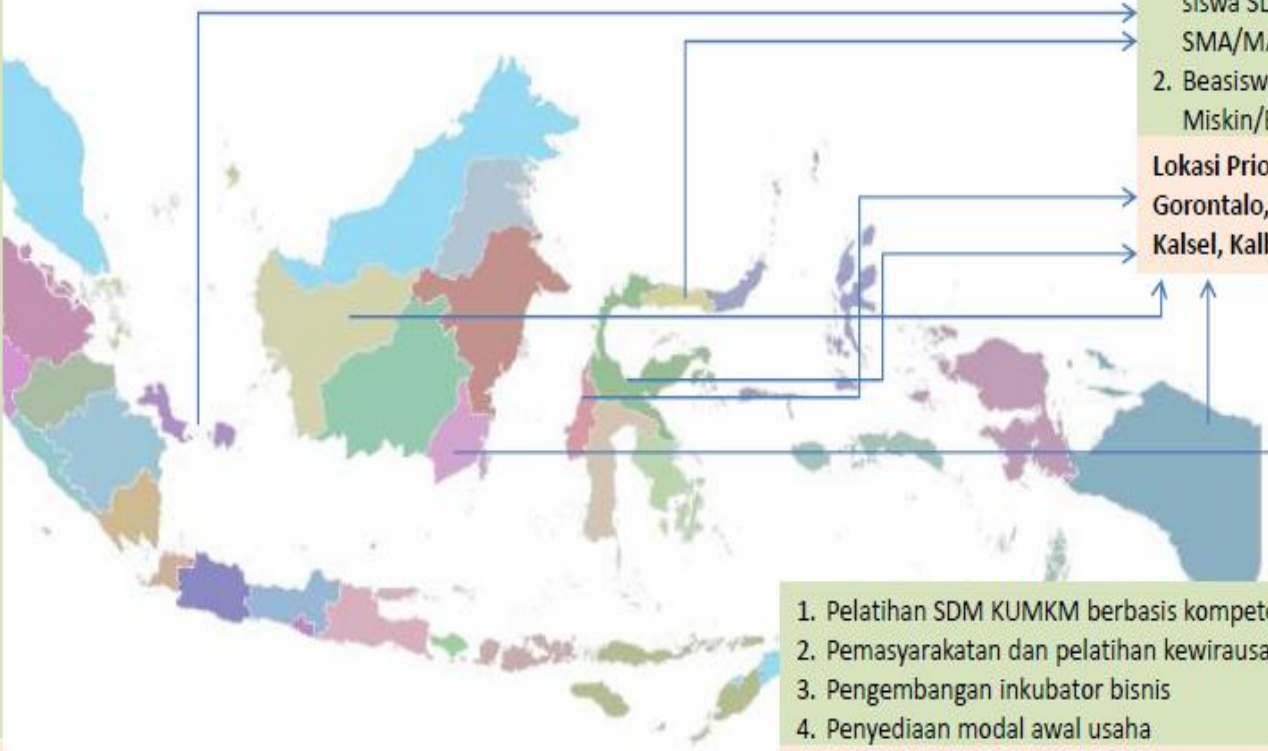
1. Pembangunan Infrastruktur Dasar
2. Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata
3. Pembentukan Kelembagaan Destinasi Pariwisata
4. Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Pariwisata
5. Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)
6. Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata
7. Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata)
8. Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan
9. Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib
10. Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata

1. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI
2. Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI
4. Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI
5. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK
6. Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI

HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL: 7. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Bantuan pangan melalui *voucher*/ layanan keuangan digital di 98 kota dan 143 kabupaten
2. Bantuan luran bagi Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional
3. Bantuan pendidikan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK melalui KIP
4. Penyaluran Bantuan PKH Secara Non Tunai
5. Subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA
6. Subsidi elpiji 3 kg
7. Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi
8. Penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Lokasi Prioritas: Papua, Papua Barat, NTT, Gorontalo, Maluku, Aceh, Bengkulu, NTB, Jateng, Sumsel, Sulteng, Sultra



1. Bantuan pendidikan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK melalui KIP
2. Beasiswa Mahasiswa Miskin/Bidik Misi

Lokasi Prioritas: Papua, Sulbar, Gorontalo, Sulteng, Kep. Babel, Kalsel, Kalbar

1. Pelatihan SDM KUMKM berbasis kompetensi
2. Pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan
3. Pengembangan inkubator bisnis
4. Penyediaan modal awal usaha

Lokasi Prioritas: Kepri, Kaltim, Jabar, Aceh, Banten, Babel, Sulut, Maluku, Sumut

TAHAPAN RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2018

❑ Koordinasi dengan Mitra K/L

- ❑ Temu Triwulanan I-2017 Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia
- ❑ Penyusunan Rancangan Awal RKP 2018
- ❑ Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP
- ❑ Paparan Usulan Proyek Prioritas oleh Pemerintah Daerah

❑ Rangkaian Musrenbang Provinsi

- ❑ Rancangan Awal RKP 2018 dan Pagu Indikatif
- ❑ Rakorbangpus dan Pagu Indikatif
- ❑ Multilateral Meeting

- ❑ Pembahasan Pendahuluan di DPR
- ❑ Rancangan RKP 2018
- ❑ Trilateral Meeting

- ❑ Penyusunan NK dan RAPBN
- ❑ Penelaahan RKA K/L



- ❑ Workshop Internal
- ❑ Temu Konsultasi Triwulanan III-2016 Bappenas dengan Bappeda Provinsi
- ❑ Arah Kebijakan Presiden

- ## ❑ Rakortek dengan Pemerintah Daerah
- ❑ Rangkaian Musrenbang Provinsi

- ❑ Bilateral Meeting
- ❑ Temu Triwulanan II - 2017 Bappenas - Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia
- ❑ Musrenbang Nasional

- ❑ Perpres RKP 2018
- ❑ Pagu Anggaran
- ❑ Penyampaian Indikasi Alokasi Prioritas (Pemda, BUMN, dan Pelaku Pembangunan lainnya)



AGENDA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pembentukan (Orientasi) Tim Penyusun RKPD	11 Januari
3	Forum Konsultasi Publik	7 Februari
4	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	11 Januari – 7 Februari
5	Surat Edaran Gubernur (Rancangan agenda)	9 Februari
6	Penyusunan Rancangan Renja PD	23 Januari – 20 Februari
7	Forum PD (Rakornis/Rakortek PD Prov)	06 – 17 Februari (2 minggu Tentatif)
8	Penyampaian Rancangan Renja PD ke BAPPEDA	20 Februari
9	Musrenbang Kabupaten/Kota	01 – 10 Maret
10	Pelaksanaan Forum Gabungan PD Provinsi	06 - 17 Maret
11	Penyusunan Rancangan RKPD	01– 27 Maret
12	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	30 Maret
13	Pelaksanaan Pasca Musrenbangprov	25 April
14	Pelaksanaan Musrenbang Nasional	26 - 27 April
15	Perumusan Rancangan Akhir RKPD	25 April - 28 April
16	Penetapan Perkada RKPD	02 Mei
17	SK Kepala Daerah Pengesahan Renja	09 Mei





Jetimakasih...